

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR

Syahril¹, Airul Syahrif^{1*}, Andi Hermanto¹, Husni Mubarak¹, Fadil Muhammad¹

¹Universitas Negeri Makassar, Indonesia

*Correspondence E-mail: airul.syahrif@unm.ac.id

Kata Kunci:

Dokumen RAT,
Penanggulangan
Kemiskinan,
Kota Makassar.

Abstrak

Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah Kota Makassar dalam menyusun dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan yang komprehensif, terukur, dan implementatif. Kota Makassar yang memiliki tingkat kemiskinan 4,97 persen dengan 79,53 ribu jiwa penduduk miskin pada tahun 2024 menghadapi tantangan kompleks dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen. Permasalahan yang dihadapi mencakup keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam menganalisis data kemiskinan multidimensional dan kesulitan dalam mengintegrasikan program lintas sektor. Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan metode pendampingan sistematis yang menggabungkan pemberian materi edukasi, forum diskusi kelompok (FGD), dan penyusunan draf dokumen RAT. Kegiatan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, melibatkan 32 peserta dari 15 perangkat daerah anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Hasil kegiatan menghasilkan draf dokumen RAT Tahun 2026 yang komprehensif. Selain luaran draf dokumen, kegiatan juga telah membangun kapasitas peserta yang signifikan. Dengan adanya kegiatan ini, peserta mendapatkan peningkatan pemahaman terhadap berbagai aspek penanggulangan kemiskinan dan dapat merumuskan draf penanggulangan kemiskinan. Pendampingan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas berkelanjutan melalui metode partisipatif dan kolaboratif efektif dalam membangun pemahaman dan komitmen implementasi program penanggulangan kemiskinan yang terukur dan berkelanjutan.

Keywords:

RAT Document,
Poverty
Alleviation,
Makassar City

Abstract

Assistance in preparing the Annual Action Plan (RAT) for Poverty Alleviation is a community service activity aimed at enhancing the capacity of Makassar City government apparatus in compiling a comprehensive, measurable, and implementable RAT document for poverty alleviation. Makassar City, with a poverty rate of 4.97 percent and 79,530 poor residents in 2024, faces complex challenges in achieving the target of eliminating extreme poverty at 0 percent, including limited capacity of local apparatus in analyzing multidimensional poverty data and difficulties in integrating cross-sectoral programs. The service activity was conducted using a systematic mentoring method that combines educational material provision, group discussion forums (FGD),

152

How to Cite: Syahril, Syahrif, A., Hermanto, A., Mubarak, H., & Muhammad, F. (2026). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MAKASSAR. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 3(1), 152–162. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v3i1.749>



and drafting of the RAT document, taking place within the Makassar City Government environment and involving 32 participants from 15 regional agencies that are members of the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD). The activity produced a comprehensive draft of the 2026 RAT document, significantly building participants' capacity with improved understanding of various poverty alleviation aspects and the ability to formulate a poverty alleviation draft, demonstrating that sustainable capacity building through participatory and collaborative methods is effective in fostering understanding and commitment to implementing measurable and sustainable poverty alleviation programs.

Article submitted: 2025-12-30. Revision uploaded: 2026-02-09. Final accepted: 2026-02-12.

PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi tantangan pembangunan yang kompleks di Indonesia, hal ini memerlukan upaya sistematis dan terkoordinasi dari para pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat secara bertahap untuk pengentasan kemiskinan [1]. Pemerintah Kota Makassar sebagai kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tantangan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem menjadi 0%, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2025 [2]. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2024, Kota Makassar memiliki 79,53 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 4,97 persen. Hal ini menunjukkan bahwa skala permasalahan kemiskinan di kota besar memerlukan pendekatan yang komprehensif [3].

Salah satu faktor yang menjadi tantangan Pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem adalah tekanan inflasi. Data BPS menunjukkan bahwa inflasi di Makassar relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir, namun terdapat periode tertentu di mana harga kebutuhan pokok meningkat cukup signifikan sehingga menyulitkan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sementara di lain sisi, rumah tangga miskin mengalami kesulitan untuk menaikkan pendapatan mereka. Perlu adanya upaya penguatan perekonomian masyarakat tidak terlepas dari perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. [4]

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi landasan kebijakan yang mengharuskan setiap daerah untuk menyusun dokumen perencanaan yang terstruktur [2]. Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan merupakan instrumen krusial yang berfungsi sebagai pedoman koordinasi bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan setiap perangkat daerah dalam mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan ke dalam perencanaan dan penganggaran mereka. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 mewajibkan setiap pemerintah daerah untuk membentuk TKPKD dan menyusun dokumen RAT sebagai bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). [5]

Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan dokumen RAT mencakup keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam menganalisis data kemiskinan yang kompleks, kesulitan dalam mengintegrasikan program lintas sektor, dan ketidakpastian dalam menentukan strategi intervensi yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan [6]. Sebagian besar perangkat daerah masih mengalami kendala dalam memahami multidimensi dalam kemiskinan. Tidak hanya aspek pendapatan, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kemandirian ekonomi. Selain itu juga perlu diperhatikan upaya

untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pendidikan, serta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya moderasi beragama dan hukum dalam kehidupan sehari-hari [7]

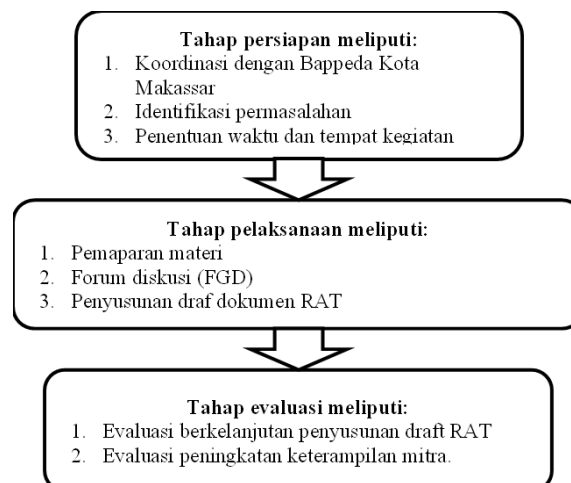
Penyusunan dokumen RAT secara sistematis dan tertib administrasi menjadi instrumen utama dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penyelenggaraan administrasi yang baik akan menghasilkan tertib administrasi dan ketersediaan data serta informasi yang akurat, sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan agar efektif dan efisien [8]. Pendampingan penyusunan dokumen RAT menjadi kegiatan strategis untuk meningkatkan kapasitas TKPKD dan aparatur daerah. Pendampingan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada penerapan langsung keterampilan yang melibatkan perangkat daerah sebagai aktor utama dalam mengidentifikasi masalah [9].

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui dua metode utama yaitu pemberian materi edukasi dan forum diskusi kelompok (FGD). Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan, kegiatan ini diharapkan menghasilkan dokumen RAT yang tidak hanya memenuhi standar teknis perencanaan, tetapi juga memiliki peran pemangku kepentingan yang kuat untuk mengimplementasikannya [10].

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan kapasitas TKPKD dan aparatur pemerintah Kota Makassar dalam menyusun dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan tahun 2026 yang komprehensif, terukur, dan implementatif. Secara spesifik, kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan, memfasilitasi analisis kondisi kemiskinan yang mendalam, merumuskan strategi dan program yang tepat sasaran, serta menetapkan indikator kinerja dan target yang terukur. Manfaat jangka pendek mencakup penyelesaian dokumen RAT yang berkualitas, sementara manfaat jangka panjang adalah peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kota Makassar yang berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui pendekatan fasilitatif yang sistematis, melibatkan narasumber dari akademisi dan peserta dari berbagai perangkat daerah. Metode pelaksanaan terdiri dari empat tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan partisipasi aktif peserta dan tercapainya *outcome* yang terukur.



Gambar 1. Diagram alir pelaksanaan pengabdian

A. Tahapan Persiapan

Tahapan persiapan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar selaku sekretariat TKPKD. Persiapan mencakup identifikasi peserta dari berbagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, penyiapan bahan ajar dan materi presentasi, serta penyiapan dokumen-dokumen penunjang seperti data kemiskinan terkini, analisis evaluasi program tahun sebelumnya, dan kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan tingkat nasional dan daerah. Narasumber melakukan koordinasi dengan peserta untuk memahami konteks lokal, tantangan spesifik yang dihadapi, serta kebutuhan kapasitas yang prioritas. Tim persiapan juga merancang instrumen FGD yang dirancang untuk memfasilitasi identifikasi masalah, *brainstorming* solusi, dan *consensus building* tentang program-program penanggulangan kemiskinan.

B. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terbagi dalam dua komponen utama: pemberian materi dan forum diskusi kelompok (FGD). Materi edukasi disampaikan dalam tiga sesi utama untuk membangun pemahaman komprehensif peserta. Sesi pertama berfokus pada kerangka konseptual dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, mencakup dimensi kemiskinan multidimensional, kerangka regulasi (UU No. 32 Tahun 2004, Permendagri No. 53 Tahun 2020, Inpres No. 8 Tahun 2025), dan peran TKPKD serta RKPD. Materi ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah pendapatan, tetapi juga akses terhadap pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan peluang ekonomi.

Sesi kedua menganalisis situasi kemiskinan Kota Makassar berdasarkan data terkini, mencakup perkembangan indikator kemiskinan (tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan), analisis dimensional (pendidikan, kesehatan, perumahan, ketenagakerjaan), serta identifikasi lokasi prioritas dan kelompok rentan. Sesi ini memberikan dasar data yang kuat untuk perumusan strategi.

Sesi ketiga membahas metodologi penyusunan RAT, mulai dari kerangka logis dokumen (pendahuluan, evaluasi kinerja tahun lalu, kebijakan-strategi-program-kegiatan tahun berjalan, matriks target keberhasilan, lokasi prioritas, penutup), hingga teknis penyusunan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK), penetapan target, dan penentuan alokasi anggaran.

FGD dilaksanakan dalam empat sesi dengan peserta yang beragam dari perangkat daerah yang berbeda. Tujuan FGD adalah mengubah pemahaman konseptual menjadi rumusan program konkret melalui diskusi kolaboratif. Setiap FGD dipandu oleh narasumber dengan dukungan fasilitator eksternal yang memiliki pengalaman dalam penanggulangan kemiskinan. Sesi FGD pertama berfokus pada identifikasi dan analisis masalah kemiskinan. Peserta dari berbagai perangkat daerah diminta untuk mengidentifikasi tantangan spesifik dalam domain mereka (pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, dll.) yang berkontribusi pada kemiskinan. Diskusi menggunakan metode *brainstorming* struktural untuk memastikan semua perspektif tereksplorasi. Hasil identifikasi dikelompokkan berdasarkan dimensi kemiskinan dan dianalisis akar penyebabnya.

Sesi FGD kedua membahas strategi dan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan tiga pilar kebijakan nasional: (1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui perlindungan sosial dan akses ke layanan dasar; (2) peningkatan pendapatan dan produktivitas melalui pemberdayaan ekonomi; dan (3) penurunan kantong-kantong kemiskinan melalui intervensi wilayah prioritas. Peserta

mendiskusikan program-program spesifik yang dapat dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, keterkaitan antar program, dan peluang sinergi.

Sesi FGD ketiga berfokus pada penyusunan indikator dan target. Peserta didampingi untuk merumuskan indikator kinerja kunci yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Untuk setiap indikator, peserta menetapkan capaian tahun 2025 dan target tahun 2026 dengan mempertimbangkan tren historis, kapasitas implementasi, dan ketersediaan anggaran. Sesi FGD keempat memfasilitasi finalisasi dokumen RAT melalui review kolaboratif draf dokumen, memastikan konsistensi antara berbagai bagian dokumen, dan membangun consensus tentang program-program prioritas dan alokasi sumber daya.

C. Tahap Evaluasi

Tahap akhir kegiatan adalah evaluasi hasil pendampingan, yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program dan mengukur peningkatan pemahaman peserta. Evaluasi dilakukan dengan cara menerima tanggapan atau feedback langsung dari peserta setelah kegiatan berlangsung. *Feedback* yang diterima sebagai bahan revisi dan penyempurnaan program untuk meningkatkan isi program, metodologi, dan pendekatan penyampaian materi pelatihan. Selain itu tim pengabdian dan mitra bersama membuat draft RAT sebagai *output* pemahaman materi dan teknis yang telah dipaparkan saat pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar tahun 2026 telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan 32 peserta dari 15 perangkat daerah yang merupakan anggota TKPKD. Peserta mencakup perwakilan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Penanggulangan Bencana, Bappeda, dan institusi lainnya yang memiliki peran strategis dalam penanggulangan kemiskinan.



Gambar 2. Pemberian Materi Pelatihan

Luaran utama kegiatan adalah terwujudnya dokumen RAT Pengentasan Kemiskinan Kota Makassar Tahun 2026 yang komprehensif dan operasional. Dokumen tersebut terdiri dari enam bab utama sebagaimana diarahkan dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020:

Bab I: Pendahuluan memuat latar belakang kemiskinan di Kota Makassar, tujuan penyusunan RAT, acuan kebijakan yang meliputi berbagai regulasi (UU No. 32 Tahun 2004, Perda Kota Makassar No. 3 Tahun 2025, Inpres No. 8 Tahun 2025, Permendagri No. 53 Tahun 2020), serta sistematika penulisan dokumen.

Bab II: Hasil Evaluasi Kinerja Kemiskinan Tahun Sebelumnya menganalisis capaian kinerja penanggulangan kemiskinan tahun 2024-2025 mencakup: (1) Capaian kinerja kemiskinan daerah yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 4,97 persen (2024) menjadi 4,43 persen (2025), penurunan jumlah penduduk miskin dari 79,53 ribu jiwa menjadi 71,63 ribu jiwa, dan perbaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 0,81 menjadi 0,52; (2) Capaian kinerja dimensional yang mencakup pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ketenagakerjaan; (3) Permasalahan penanggulangan kemiskinan yang diidentifikasi melalui FGD termasuk inflasi yang menggerus daya beli masyarakat miskin, aksesibilitas pendidikan dasar yang masih belum merata, prevalensi stunting yang masih tinggi, ketidaklayakan rumah tinggal, pengangguran tersembunyi dan sektor informal yang masih dominan; dan (4) Evaluasi program penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya yang mengkaji efektivitas, efisiensi, dan relevansi program-program yang telah dilaksanakan.

Bab III: Kebijakan, Strategi, Program, dan Kegiatan Tahun Berjalan merancang strategi penanggulangan kemiskinan Kota Makassar tahun 2026 mengacu pada tiga pilar kebijakan nasional. Dokumen ini mengidentifikasi dan menginventarisasi 94 program, 133 kegiatan, dan 259 sub-kegiatan dari berbagai perangkat daerah yang relevan dengan penanggulangan kemiskinan. Melalui FGD, peserta melakukan mapping program-program existing dan mengidentifikasi program-program baru yang diperlukan untuk mencapai target penurunan kemiskinan.

Bab IV: Matriks Target Keberhasilan menetapkan indikator kinerja utama (IKU) penanggulangan kemiskinan: (1) Tingkat kemiskinan target 3,46 persen (turun dari baseline 4,43 persen); (2) Jumlah penduduk miskin target 51,30 ribu jiwa (turun dari 71,63 ribu jiwa); (3) Indeks kedalaman kemiskinan (P1) target 0,46 poin (turun dari 0,52 poin); (4) Indeks keparahan kemiskinan (P2) target 0,08 poin (turun dari 0,10 poin). Selain itu, dokumen juga menetapkan 20 indikator kinerja kunci (IKK) dari berbagai perangkat daerah yang meliputi: jumlah peserta didik penerima beasiswa pendidikan dasar, jumlah masyarakat miskin penerima bantuan jaminan kesehatan, jumlah PMKS yang menerima bantuan kesejahteraan, jumlah rumah tangga miskin penerima bantuan pembangunan rumah, dan indikator-indikator spesifik lainnya.

Bab V: Lokasi Prioritas mengidentifikasi kecamatan dan kelurahan prioritas berdasarkan konsentrasi penduduk miskin. Analisis spasial menunjukkan bahwa kemiskinan terdistribusi di semua kecamatan di Kota Makassar, namun dengan konsentrasi tertinggi di kecamatan-kecamatan tertentu. Pendekatan lokasi prioritas ini memastikan efektivitas penggunaan sumber daya terbatas dengan fokus pada area-area dengan beban kemiskinan tertinggi.

Bab VI: Penutup berisi kesimpulan dan arahan implementasi RAT, menekankan urgensi sinergi antar perangkat daerah, keterlibatan sektor swasta dan masyarakat sipil, serta komitmen pemerintah Kota Makassar untuk mencapai target pengurangan kemiskinan.



Gambar 3. Forum grup diskusi

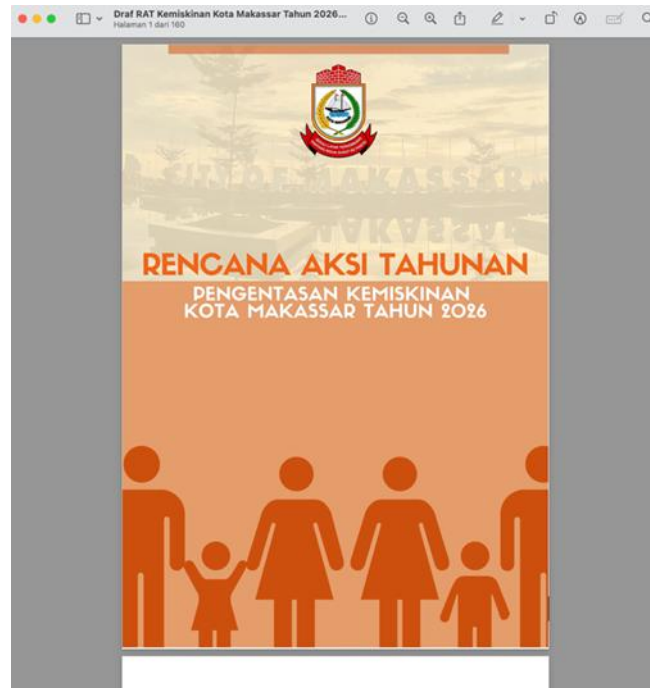
B. Peningkatan Kapasitas Peserta

Hasil evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap berbagai aspek penanggulangan kemiskinan. Sebanyak 87,5 persen peserta (28 dari 32) melaporkan peningkatan pemahaman terhadap kerangka konseptual dan kebijakan penanggulangan kemiskinan, 84,4 persen (27 dari 32) peserta meningkat pemahamannya terhadap dimensi multifaset kemiskinan dan pendekatan holistik penanganannya, dan 90,6 persen (29 dari 32) peserta merasa lebih kompeten dalam merumuskan indikator dan target program penanggulangan kemiskinan.



Gambar 4. Penyampaian hasil dan evaluasi kegiatan

Selain itu, 81,3% peserta (26 dari 32) melaporkan bahwa FGD sangat bermanfaat dalam memfasilitasi understanding tentang peran masing-masing perangkat daerah dan pentingnya sinergi lintas sektor. Peserta juga mengungkapkan bahwa proses FGD yang interaktif memungkinkan mereka untuk berbagi tantangan spesifik yang dihadapi perangkat daerah mereka dan menemukan solusi kolaboratif. Testimonial peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dalam penyusunan RAT, tetapi juga membangun political will dan komitmen untuk mengimplementasikan program-program yang telah dirumuskan.



Gambar 5. Draf RAT Pengentasan Kemiskinan Kota Makassar 2026

C. Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendampingan sistematis dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RAT memiliki signifikansi strategis dalam meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Hasil kegiatan sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan masih memerlukan penguatan, terutama dalam hal analisis data kemiskinan yang komprehensif dan integrasi program lintas sektor. [4]

Metode pendampingan yang mengkombinasikan pemberian materi edukasi dengan forum diskusi kelompok terbukti efektif dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Pendekatan sosialisasi yang disertai dengan diskusi interaktif dan pendampingan terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pelaksanaan. [11] Selanjutnya perlu adanya pendampingan berkelanjutan untuk implementasi penanggulangan kemiskinan ekstrem kepada masyarakat secara langsung, melalui peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat.

Dokumen RAT yang dihasilkan menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan integrasi lintas sektor yang komprehensif. Identifikasi 94 program dari 15 perangkat daerah menunjukkan bahwa masalah kemiskinan melibatkan berbagai sektor kehidupan masyarakat. Integrasi program ini penting karena kemiskinan adalah fenomena multidimensional yang tidak dapat diatasi hanya melalui intervensi dalam satu sektor saja. [11]

Sebagai contoh, pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan memerlukan tidak hanya bantuan sosial langsung, tetapi juga peningkatan akses pendidikan oleh Dinas Pendidikan, peningkatan akses kesehatan oleh Dinas Kesehatan, perbaikan infrastruktur perumahan oleh Dinas Perumahan, pemberdayaan ekonomi oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, dan penciptaan lapangan kerja. FGD memfasilitasi dialog lintas sektor ini, memungkinkan setiap perangkat daerah untuk memahami kontribusi mereka dalam tujuan bersama pengentasan kemiskinan dan mengidentifikasi peluang kolaborasi dan sinergi. [12]

Meskipun kegiatan pendampingan telah menghasilkan output yang komprehensif, beberapa tantangan implementasi yang potensial telah diidentifikasi melalui diskusi dengan peserta:

1. Keterbatasan Anggaran: Banyak program yang dirancang memerlukan alokasi anggaran yang signifikan, sementara APBD daerah memiliki keterbatasan fiskal. Rekomendasi adalah optimalisasi penggunaan anggaran existing melalui efisiensi dan reallokasi, serta penggalangan sumber pendanaan alternatif dari sektor swasta (CSR) dan masyarakat sipil.
2. Koordinasi dan Sinergi: Implementasi RAT memerlukan koordinasi intensif antar perangkat daerah, yang seringkali menghadapi hambatan birokrasi dan kepentingan sektoral. Rekomendasi adalah penguatan peran TKPKD sebagai koordinator strategis, penetapan incentive untuk kolaborasi, dan peningkatan regulasi internal yang mendorong sinergi.
3. Data dan Monitoring: Implementasi program-program yang terukur memerlukan sistem data yang akurat dan *real-time*, serta *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan. Rekomendasi adalah peningkatan kapasitas dalam menggunakan teknologi informasi untuk pendataan kemiskinan, pengembangan *dashboard monitoring* program penanggulangan kemiskinan, dan sistem pelaporan yang terintegrasi.
4. Partisipasi Komunitas dan Stakeholder Eksternal: Keberhasilan RAT sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat miskin dan keterlibatan sektor swasta serta organisasi masyarakat sipil. Rekomendasi adalah pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi program, penguatan dialog dengan stakeholder eksternal, dan penciptaan ruang-ruang untuk *accountability* dan transparansi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berkontribusi pada peningkatan pengetahuan mengenai sistematis penyusunan dokumen RAT Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar. Melalui pendekatan sistematis tersebut, Kota Makassar diharapkan mampu menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Sehingga dengan adanya program pengabdian ini Kota Makassar diharapkan menjadi kota yang serius dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengurangan kemiskinan relatif. Draft dokumen RAT yang dihasilkan menjadi instrumen konkret untuk melaksanakan kebijakan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar telah berhasil meningkatkan kapasitas TKPKD dan aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Melalui kombinasi pemberian materi *edukasi* dan forum diskusi kelompok yang partisipatif, kegiatan telah menghasilkan dokumen draft RAT yang komprehensif, terintegrasi, dan implementatif. Luaran utama kegiatan adalah tersusunnya draft dokumen RAT yang mencakup analisis situasi kemiskinan yang mendalam, perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor, penetapan indikator dan target yang terukur, serta identifikasi lokasi prioritas intervensi. Selain



luan draf dokumen, kegiatan juga telah membangun kapasitas peserta yang signifikan. Dengan adanya kegiatan ini, peserta mendapatkan peningkatan pemahaman terhadap berbagai aspek penanggulangan kemiskinan dan dapat merumuskan draf penanggulangan kemiskinan. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan sistematis dalam penyusunan dokumen perencanaan merupakan investasi penting dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan. Untuk keberlanjutan, diperlukan dukungan berkelanjutan dalam implementasi RAT, termasuk *capacity building* tambahan dalam *monitoring dan evaluasi*, penguatan koordinasi lintas sektor, dan pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengimplementasian program-program yang telah dirumuskan. Dokumen RAT yang telah disusun diharapkan dapat membantu mencapai target pengurangan kemiskinan di Kota Makassar dan berkelanjutan menuju penghapusan kemiskinan ekstrem.

REFERENSI

- [1] F. Leuhery, F. Amalo, P. A. Cakranegara, R. Rara, A. Widaningsih, dan K. Mere, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sebagai Upaya Pengentaskan Kemiskinan,” *Communnity Development Journal*, vol. 4, hlm. 8273–8277, 2023, Diakses: 11 Februari 2026. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/19477>
- [2] Presiden Republik Indonesia, “Instruksi Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2025,” Jakarta, 2025.
- [3] BPS Kota Makassar, “Kota Makassar Dalam Angka,” Makassar, 2025.
- [4] E. Cahyani dkk., “Peran Pengabdian Masyarakat dalam Upaya Pemberdayaan Keluarga Ekonomi Lemah di Kelurahan Pa’baeng- baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar,” *IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 3, no. 3, Jun 2024. <https://doi.org/10.26858/iptek.v3i3.65084> .
- [5] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020,” Jakarta, 2020.
- [6] R. Dwi Wahyunengseh, S. Hastjarjo, D. Didik, dan G. Suharto, “Diseminasi Komponen Collaborative Governance Untuk Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Penanggulangan Kemiskinan,” *DHARMAKARYA: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, vol. 9, no. 2, hlm. 78–84, Jun 2020. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v9i2.23749> .
- [7] Neliwati, I. J. K. Siregar, A. L. Ramadhan, R. A. Nasution, M. P. A. Ginting, dan F. P. Adeana, “Pengabdian Masyarakat Dalam Peningkatan Kesejahteraan Desa Berbasis pendidikan, Moderasi Beragama, Pengentasan Kemiskinan, Pencegahan Stunting, Dan Penyuluhan Hukum Refleksi Dari KKN 49 Di Desa Lubuk Hulu Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara,” *Jurnal of Human and Education*, 2024, Diakses: 11 Februari 2026. <https://jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1481>
- [8] M. D. Al Sunah, E. Bustami, dan Afrianti, “Workshop Pelatihan Peranan Aparat Desa Dalam Melaksanakan Tugas Administratif Pemerintah Desa,” *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 1, no. 3, hlm. 304–310, Des 2024. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i3.232> .
- [9] F. Febiantoni, E. Kusdarini, A. M. Fathurrahman, A. Priyanto, dan M. C. Al Mashumiyah, “Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa Bagi Perangkat Desa Kelurahan Guwosari,” *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 2, no. 4, hlm. 559–567, Nov 2026. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v2i4.630> .
- [10] I. A. Akbar dan A. Susiantoro, “Implementasi Aplikasi Si Keluarga Miskin Dalam Rangka Menekan Angka Kemiskinan Di Wilayah Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota



-
- Surabaya,” *Jurnal Pengabdian Nasional*, vol. 05, no. 06, 2025. <https://doi.org/10.69957/abdimass.v5i06.1541> .
- [11] M. Thamimi, Hariyadi, F. Wulansari, A. Yuliansyah, dan A. A. Alimin, “Sosialisasi Dan Peningkatan Pemahaman Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia,” *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, vol. 1, no. 3, hlm. 325–331, Des 2024. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i3.176> .
- [12] R. S. S. Sidiq, “Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Meranti,” *REFORMASI*, vol. 10, no. 2, hlm. 217–227, Sep 2020. <https://doi.org/10.33366/RFR.V10I2.1954> .
- [13] R. P. Khasanah, E. P. Purnomo, dan A. N. Kasiwi, “Collaborative Governance In National Community Empowerment Programs in Poverty Alleviat,” *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, vol. 9, no. 1, hlm. 29–35, Jun 2021. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v9i1.3755> .